



## MENCARI SOLUSI DEFISIT ULAMA: POTRET KADERISASI ULAMA MUHAMMADIYAH

### LOOKING FOR SOLUTIONS TO THE DEFICIT OF CLERICS: POTRAIT OF THE REGENERATION OF MUHAMMADIYAH CLERICS

**Palahuddin**

*Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*

*email: falahuddin@zain@gmail.com*

---

Naskah Diterima: 4 Juni 2022; Direvisi: 7 September 2022; Disetujui: 7 September 2022

---

#### **Abstract**

*This study describes the dynamics within internal Muhammadiyah in overcoming the lack of clerics. The method of qualitative with a phenomenological approach was applied. Data were collected by observation, documentation, and in-depth interviews with the informants. The collected data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis method. The results of this study indicated that: [1]. Muhammadiyah has not yet formulated the concept of clerics in detail. However, at least two ideal characteristics of Muhammadiyah clerics, namely [a]. Mastering *al-'ulum al-shari'yyah* (religious sciences); [b]. Engage in community activities (*al-ihtimam bi umur al-ummah*); [2]. Three Muhammadiyah efforts to overcome the clerics' shortage: establishing Tarjih Muhammadiyah Clerics Education, revitalizing the role of pesantren, and building collaboration with Asia Muslim Charity Foundation (AMCF). The theoretical implication of this study is the existence of a new model in clerics' regeneration by building institutional network cooperation between Muhammadiyah and AMCF. In addition, future study on the effectiveness of *ma'had* education as a part of the infrastructure for Muhammadiyah clerics' regeneration is also required.*

**Keywords:** Deficit; Muhammadiyah; Solution; Cleric

#### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang dinamika Muhammadiyah dalam mencari solusi kelangkaan ulama. Penelitian berbentuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: [1]. Muhammadiyah belum merumuskan tentang konsep ulama secara detail. Namun demikian, terdapat minimal 2 karakteristik ulama yang menjadi idealisme para tokoh Muhammadiyah, yaitu [a]. Menguasai *al-'ulum al-shari'yyah* (ilmu-ilmu keagamaan); [b]. Terlibat dan berbaur dalam kegiatan masyarakat (*al-ihtimam bi umur al-ummah*); [2]. Terdapat 3 upaya Muhammadiyah dalam mengatasi defisit ulama, yaitu: mendirikan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), revitalisasi peran pesantren, dan membangun kerjasama dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF). Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya model baru kaderisasi ulama dengan membangun jaringan kerjasama institusional antara Muhammadiyah dengan AMCF. Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya kajian mendalam tentang efektivitas pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah.

**Kata kunci:** Defisit; Muhammadiyah; Solusi; Ulama

## PENDAHULUAN

Muhammadiyah sedang mengalami defisit ulama (Isnanto, 2017). Dalam sebuah wawancara yang dimuat dalam situs tabligmu (2016), ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tabligh dan Tarjih, almarhum Yunahar Ilyas, menyebutkan bahwa defisit ulama yang terjadi di Muhammadiyah telah dirasakan sejak tahun 1985. Ulama yang berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*) (Geertz, 1960), mediator (Bagader, 1983), administrator keagamaan (Daud, 1997), penggerak modernisasi dan *agent of change* (Hirokoshi, 1987), makelar politik (Zaman, 1995), serta sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam bidang keagamaan (*religious practical guidance*) terasa mulai langka di lingkungan Muhammadiyah. Sebagai ormas keagamaan yang mengusung semboyan *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbulah*, tentu figur ulama menjadi salah satu ikon yang harus menjadi atensi Muhammadiyah.

Defisit ulama semakin terasa jika dikaitkan dengan populasi warga atau simpatisan Muhammadiyah yang menetap di suatu ranting/desa. Kalau jumlah ranting di seluruh wilayah Indonesia yang ditempati oleh warga/simpatisan Muhammadiyah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 13.570 buah (PP. Muhammadiyah, 2015), maka ulama yang dibutuhkan minimal sejumlah ranting tersebut. Itu dengan asumsi kebutuhan satu ulama untuk satu ranting kecil yang jumlah jamaah dan luas wilayahnya kecil. Kebutuhan terhadap ulama tentu lebih dari satu orang jika sebuah ranting cukup besar. Sementara berdasarkan laporan para pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam pertemuan-pertemuan formal yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah menunjukkan bahwa stok ulama Muhammadiyah yang tersedia saat ini di tempat mereka tinggal belum ideal.

Defisit ulama semakin tampak dengan memperhatikan data lembaga pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk menyiapkan kader ulama seperti pesantren. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa dari total 40.143 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, tercatat

sebanyak 102 merupakan lembaga pendidikan yang dikelola dalam bentuk pesantren (PP. Muhammadiyah, 2015). Hal ini berarti hanya 0,25% lembaga pendidikan milik Muhammadiyah yang memiliki konsentrasi untuk menyiapkan kader ulama melalui jalur pendidikan pesantren.

Keprihatinan terhadap defisit ulama di Muhammadiyah semakin terasa setelah K.H. Azhar Basyir meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1994 di saat ia menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Praktis figur ketua umum PP Muhammadiyah yang selama ini dijabat oleh tokoh yang berpredikat kiai sebagai simbol seorang ulama digantikan oleh figur akademisi yang bergelar profesor doktor dengan latar belakang pendidikan umum. Pergeseran figur pimpinan ini tampak pada diri para ketua umum PP Muhammadiyah pasca beliau seperti Amien Rais (1995-1998), Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), Din Syamsudin (2005-2015) dan sekarang Haedar Nashir (2015-2020). Meskipun para ketua umum yang bergelar professor doktor pasca kiai Azhar Basyir ini pernah mengenyam dunia pesantren dan juga menguasai kitab kuning dan ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum al-shari'yyah*) sebagai salah satu prasyarat menjadi ulama, tetapi predikat kiai atau ulama jarang sekali terdengar di telinga warga persyarikatan, apalagi di masyarakat umum. Kondisi inilah yang menambah kesan bahwa dalam Muhammadiyah telah terjadi transformasi kepemimpinan dari figur kiai (ulama) kepada figur akademisi (bukan ulama).

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian tentang upaya Muhammadiyah mengatasi defisit ulama sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ulama yang menjadi idealisme Muhammadiyah, dan bagaimana dinamika Muhammadiyah dalam mengatasi defisit ulama.

## KAJIAN TEORI

Term “kaderisasi” secara etimologis berasal dari asal kata “kader” yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu *cadre* atau *les cadres*, yang berarti anggota inti dan jantung yang menjadi bagian terpenting dalam organisasi

kepemimpinan. Dalam bahasa Latin, kader juga disebut dengan *quadrum*, yang berarti empat persegi panjang atau kerangka (PP Muhammadiyah, 2016). Secara historis, term “kader” pada mulanya digunakan dalam bidang militer untuk menyebut aktivitas pembinaan pada pasukan inti yang siap digunakan kapan saja saat diperlukan (Fatah, 2000).

Secara terminologis, kaderisasi adalah proses penyiapan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan bertanggungjawab penuh terhadap sebuah organisasi (Kartono, 1994). Hampir sama dengan pengertian kaderisasi dalam teori kepemimpinan, Muhammadiyah juga mendefinisikan kaderisasi sebagai aktivitas penyiapan anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2016). Maksud kaderisasi ulama Muhammadiyah dalam artikel ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mendidik manusia secara utuh agar menjadi ulama dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan Muhammadiyah.

Secara teologis dan organisatoris, kaderisasi ulama Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat strategis. Selain karena titah (*khitab*) Ilahi (QS. An-Nisa: 9), kaderisasi ulama Muhammadiyah juga berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan peneguhan ideologi, pewarisan nilai dan yang paling penting adalah sebagai media regenerasi, termasuk suksesi kepemimpinan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2016). Sebagai ormas keagamaan, selain kompetensi di bidang kepemimpinan dan lainnya, profil dan figur ulama tentu menjadi bahan pertimbangan khusus bagi warga Muhammadiyah dalam memilih pemimpinnya pada masing-masing tingkatan.

Syamsul Anwar (2017), menyebutkan bahwa ada 2 model kaderisasi ulama di Muhammadiyah, yaitu kaderisasi formal dan non formal. Kaderisasi formal adalah kaderisasi melalui sekolah atau lembaga pendidikan seperti Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerjasama dengan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sedangkan kaderisasi non-formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk training-training keulamaan dan ketarjihan terutama dengan pelibatan kader-kader muda. Secara teknis, kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Divisi Fatwa dan Divisi Kaderisasi dan Organisasi. Secara teknis, model kaderisasi ulama Muhammadiyah ini sama dengan model kaderisasi pada umumnya di lembaga-lembaga lain (Rivai, 2012).

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam konteks pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara faktual dan objektif (Moleong, 2004). Data riset diperoleh dari data pustaka atau literatur, berupa dokumen-dokumen yang terkait penelitian (Sudijono, 1986) terkait kaderisasi ulama di Muhammadiyah. Selain itu juga dilakukan observasi di PUTM Yogyakarta, *ma'had* Khalid bin Walid AMCF di Mataram, UMS Surakarta, dan Mu'allimin Yogyakarta. Untuk menambah dan menguatkan data dilakukan wawancara langsung dengan 8 informan kunci yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini dinalisis menggunakan metode analisis data interaktif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Kualifikasi Ulama Muhammadiyah

Terminologi ulama telah menjadi terminologi umum dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah Indonesia, sebutan ulama cukup beragam: di Aceh misalnya disebut dengan *teungku*, di Sumatera Barat dipanggil dengan *tuanku* atau *buya*, di Nusa Tenggara Barat populer dengan gelar *tuan guru* (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1994), di Jawa Barat dikenal sebagai *ajengan*, di Jawa Timur dan Jawa Tengah

disebut kiai (Dhofier, 2011), di Kalimantan Selatan dipanggil guru, mua'llim, dan tuan guru (Makmur, 2012).

Terminologi ulama disebut di dalam Alquran pada surat Fathir: 28 dan al-Syuara: 197. Dalam surat Fathir tersebut dijelaskan bahwa ulama adalah hamba-hamba Allah yang takut (*khashyah*) kepada kemahakuasaanNya, sehingga mereka mengkaji dan mengamalkan isi Alquran. Sedangkan dalam surat as-Syuara: 197 dijelaskan mengenai peringatan Allah kepada ulama Bani Israil tentang pengingkaran mereka (terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw), karena turunnya Alquran telah disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Demikian juga dalam hadis disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu agama, sifat dan perilaku nabi. Mereka tidak mewarisi kenabian dan harta benda (Makmur, 2012).

Secara etimologis, ulama merupakan bentuk plural (jamak) dari kata alim, yang berarti orang-orang terpelajar, sarjana dan yang memiliki ilmu pengetahuan (Munawwir, 1997). Sedangkan secara terminologis, ulama adalah orang-orang yang menekuni dan memiliki kompetensi spesifik di bidang ilmu-ilmu agama (Shihab, 1992), atau *al-'ulum al-shar'iyah* dengan semua cabang-cabangnya (ilmu bahasa Arab, Alquran dan ilmu-ilmunya, hadis dan ilmu-ilmunya, fikih dan usul fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, tasawuf dan lain-lainnya).

Quraish Shihab (1992) menganalisis 2 terminologi "ulama" yang terdapat dalam surat Fathir: 28 dan as-Syuara: 197, kemudian mengaitkannya dengan term "ilmu" dengan berbagai derivasinya yang berjumlah 854 buah yang ada dalam Alquran. Dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa terminologi "ulama" pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang apa saja. Tetapi dalam perkembangan zaman dan untuk kepentingan pembidangan ilmu pengetahuan, terminologi "ulama" mengalami penyempitan makna (spesialisasi) yang digunakan khusus bagi mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam saja.

Di kalangan para tokoh Muhammadiyah, bagaimana konsep, profil dan kualifikasi tentang ulama ternyata cukup beragam. Dalam

pandangan Yunahar Ilyas (2018) misalnya, ia menyebutkan bahwa seorang ulama di Muhammadiyah harus memiliki 3 kompetensi utama sekaligus, yaitu kompetensi dalam bidang agama Islam (*al-'ulum al-shar'iyah*), pribadi yang khashyatillah (takut kepada Allah, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat (*al-ihtimam bi umur al-muslimin*).

Terkait dengan kompetensi *pertama*, kompetensi di bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulum al-shar'iyah*), Yunahar menjelaskan lebih lanjut bahwa kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulum al-shar'iyah*) yang harus dimiliki oleh ulama Muhammadiyah merupakan kompetensi individual yang bersifat mutlak dan fardu ain. Adapun kompetensi ilmu-ilmu lain di luar ilmu-ilmu agama Islam bersifat fardu kifayah, sehingga walaupun ada anggota Majelis Tarjih yang memiliki kompetensi selain dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam seperti dokter, bukan termasuk ulama. Yunahar (2018) menerangkan:

"Seorang ulama dalam Muhammadiyah harus menguasai *al-'ulum al-shar'iyah* atau ilmu-ilmu agama Islam. Ini wajib hukumnya. Dan ini yang paling pokok dan bersifat fardu ain bagi setiap ulama Muhammadiyah. Adapun ilmu-ilmu selain *al-'ulum al-shar'iyah*, ilmu-ilmu itu bersifat fardu kifayah. Meskipun ada dokter misalnya yang menjadi anggota majelis Tarjih dia bukan ulama".

Kompetensi ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulum al-shar'iyah*) yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah kompetensi di bidang *ushuliyah* sebagaimana diterangkan lebih rinci dalam literatur usul fikih, yaitu [a] menguasai bahasa Arab, [b] menguasai Alquran, [c] menguasai sunah, [d] menguasai kias, [d] mengetahui masalah-masalah yang telah menjadi ijmak, [e] menguasai usul fikih, [f] menguasai kaidah-kaidah fikih, [g] mengetahui maksud-maksud syarak, [h] mengetahui rahasi-rahasia syarak, [i] memiliki sifat adil, jujur, dan berakhlak baik dan [j] memiliki niat yang suci (Khallaf, 1987).

Dalam proses identifikasi ulama Muhammadiyah, individu yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam (*al-'ulum al-shar'iyah*) ini disebut dengan ahli tarjih yang indikator minimalnya

adalah mampu memahami kitab kuning seperti kitab *Subul as-Salam* (Djamil, 1995). Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ismail as-Shan'ani dan merupakan *syarah* (penjelasan) dari kitab *Bulug al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berisi hadis-hadis seputar hukum Islam.

Adapun kompetensi *kedua* yang terkait dengan *khashyatillah*, Yunahar Ilyas (2018) menjelaskan bahwa dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama Muhammadiyah akan mampu membawa dirinya kepada ketakwaan kepada Allah, dimana ulama senantiasa menjalankan semua perintahNya agar dapat menggapai kedekatan kepadaNya dan senantiasa takut untuk melanggar larangan-larangaNya. Ketakwaan adalah manifestasi dari *khashyatillah*. Seorang ilmuwan ataupun intelektual dalam bidang agama yang bergelar profesor atau doktor misalnya, bukan ulama kalau tidak memiliki rasa *khashyatillah*. Inilah distingsi antara ulama dan intelektual atau cendekiawan. Terkait dengan kompetensi *khashyatillah* ini diakuinya bersifat kualitatif, karena itu indikator untuk menilainya sangat subyektif. Ia menegaskan: “Seorang ilmuwan atau intelektual bukan disebut ulama jika tidak memiliki sifat *khashyatillah*. Sekalipun dia bergelar professor doktor misalnya, dia hanya seorang intelektual. Disinilah perbedaan antara intelektual dan ulama. Cuma penilaian terhadap *khashyatillah* ini bersifat subjektif”.

Adapaun terkait dengan kompetensi *al-ihitimam bi umur al-muslimin* (*concern* terhadap problem-problem umat), seorang ulama harus terlibat, berbaur dan berada di tengah-tengah masyarakat. Ulama Muhammadiyah harus ikut terlibat dalam membimbing, memberi fatwa, dan ikut memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh mereka. Lebih dari itu ulama Muhammadiyah juga harus senantiasa memberikan peringatan kepada mereka sebagaimana disebut dalam Alquran *liyundhiru qaumahum idha raja'u ilaihim*, Yunahar Ilyas (2018) menjelaskan:

“Ulama di Muhammadiyah harus berada di tengah-tengah masyarakat. Ia terlibat dalam membimbing dan melakukan *indhar* (memberi peringatan) kepada masyarakat. Kalau ada intelektual kampus yang pekerjaannya hanya mengajar, meneliti, menulis buku, dan

tidak ikut mengurus masyarakat, ia bukan ulama. Ketentuan model seperti ini khas di Muhammadiyah yang membedakannya mungkin dengan ormas lain”.

Pandangan Yunahar Ilyas terkait dengan kompetensi ini juga sama dengan pandangan Achmad Jainuri. Ia berpendapat ulama Muhammadiyah tidak cukup menguasai kitab kuning, tetapi lebih dari itu ia adalah individu yang sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Jainuri, 2002). Ia senantiasa aktif dalam memberikan bimbingan dan penyelesaian terhadap apa yang mereka hadapi.

Syamsul Anwar (2017), ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, memiliki pandangan yang lebih ideal daripada pandangan Yunahar Ilyas. Menurutnya, selain memiliki 2 kompetensi utama sebagaimana disebut Yunahar, ulama Muhammadiyah idealnya menguasai ilmu-ilmu alat, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab harus menjadi kompetensi prioritas bagi seorang ulama, karena Alquran dan hadis yang menjadi sumber ajaran agama Islam menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan bahasa Inggris menjadi kunci pembuka khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas. Lebih dari itu, di era modern sekarang ini, ulama Muhammadiyah juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam ilmu hisab (astronomi) dan falak.

Terkait dengan konsep dan kualifikasi ulama, hingga kini Muhammadiyah, secara institusional, memang belum memutuskannya. Tokoh dan warga Muhammadiyah memiliki persepsi yang beragam tentang ulama ideal dalam Muhammadiyah. Sehingga sangat wajar terjadi perbedaan pandangan antara Yunahar Ilyas (Ketua PP bidang Tarjih dan Tajdid) dengan Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Isnanto (2017) bahkan disebutkan bahwa kualifikasi ulama, selain 3 kompetensi sebagaimana dinyatakan oleh Yunahar Ilyas, adalah aktif di Persyarikatan dan dapat dijadikan sebagai figur teladan (*uswah hasanah*). Artinya, selain menjadi teladan, ulama Muhammadiyah juga harus aktif di Persyarikatan dengan cara masuk dalam struktur organisasi. Ada juga yang memiliki

persepsi bahwa ulama ideal dalam Muhammadiyah adalah seperti tercermin dalam 2 figur, yaitu Yunahar Ilyas dan Amin Rais yang mengombinasikan antara kompetensi agama dan umum. Lalu mereka memunculkan gagasan konsep ulama ideal, yaitu ulama sekaligus juga intelektual. Di samping memiliki kompetensi dalam bidang *al-'ulum al-shar'iyah*, ulama Muhammadiyah juga harus mengerti politik dan ilmu-ilmu lain. Tentu kualifikasi ulama yang diidamkan seperti ini terlalu ketat dan ideal sehingga akan amat sulit di temukan di Muhammadiyah.

Munculnya persepsi yang beragam ini akhirnya membawa peneliti mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah belum memiliki konsep dan kualifikasi tentang ulama secara jelas dan detail. Agar kesimpulan ini meyakinkan, peneliti kemudian melakukan konfirmasi mengenai hal tersebut kepada Goffar Ismail (2020), ketua Divisi Perkaderan Ulama PP Muhammadiyah, yang peneliti anggap mengetahui dan benar-benar paham tentang perkaderan ulama, karena juga termasuk salah seorang penulis buku *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*. Ketika peneliti mengonfirmasi tentang konsep dan kualifikasi ulama Muhammadiyah, ia minta agar diberi waktu satu hari untuk mengecek hal tersebut. Setelah satu hari berlalu, ia menyampaikan:

“Setelah saya cari-cari memang Muhammadiyah belum memiliki konsep, apalagi tentang kualifikasi ulama. Kami baru sadar, sekalipun kami telah menulis buku tentang pedoman perkaderan ulama, tetapi konsep dan kualifikasi ulama belum kami bahas. Ini jadi PR (Pekerjaan Rumah) kami. Konsep tentang ulama yang ada sekarang baru sebatas persepsi tokoh tarjih Muhammadiyah”.

Peneliti merasa belum puas atas jawaban konfirmatif dari Goffar Ismail. Karena itu, peneliti kemudian melakukan *cross check* kepada Atang Salihin (2020), anggota Divisi Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah sekaligus menjadi anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sebagai alumni yang pernah mengenyam pendidikan di PUTM selama 4 tahun, peneliti memandangnya sangat

paham tentang ulama tarjih. Saat ditanya, ia mengatakan:

“Memang ustaz (sapaan/panggilan kepada penulis) belum ada konsep dan kualifikasi tentang ulama dalam Muhammadiyah. Sampai sekarang belum ada pembahasan tentang hal tersebut. Konsep yang menyatakan bahwa ulama Muhammadiyah adalah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan untuk bertarjih adalah konsep Majelis Tarjih. Jadi itu konsep majelis, belum sampai menjadi keputusan institusional Muhammadiyah yang di-*tanfidz* sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau antum mau, layangkan saja pertanyaan kepada Divisi Fatwa, nanti kami bahas”.

Dari deskripsi dan ilustrasi tentang konsep dan kualifikasi ulama di atas yang dikutip dari berbagai sumber menunjukkan adanya benang merah yang sama bahwa terdapat 2 syarat mutlak untuk menjadi ulama Muhammadiyah, yaitu memiliki kompetensi *al-'ulum al-shar'iyah* dan terjun dalam masyarakat (*al-ihitimam bi al-umum al-ummah*). Sangat mungkin syarat-syarat yang lain dianggap sebagai komplementer, seperti aktif di organisasi, menguasai bahasa Inggris dan menguasai ilmu falak; atau dianggap sebagai persyaratan kualitatif yang sulit diukur seperti kompetensi takut kepada Allah (*khashyatillah*). Tetapi satu hal yang pasti dalam praktiknya, semua lembaga pendidikan Muhammadiyah yang diorientasikan sebagai media kaderisasi ulama selalu akan mendesain seluruh aktivitas pendidikannya untuk minimal mencapai 2 kompetensi tersebut.

### **Dinamika Kaderisasi Ulama Muhammadiyah**

Syamsul Anwar (2017), ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, menyebutkan bahwa ada 2 model kaderisasi pendidikan ulama Muhammadiyah, yaitu kaderisasi formal dan nonformal. Kaderisasi formal adalah kaderisasi melalui PUTM yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Sedangkan kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk *training-training* keulamaan dan ketarjihan terutama dengan melibatkan kader-kader muda. Secara teknis, kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Divisi Fatwa dan Divisi Kaderisasi dan Organisasi.

Dalam kaderisasi formal, seluruh aktivitas pendidikan diorientasikan secara langsung untuk merealisasikan visi melahirkan ulama sejati Muhammadiyah. Hal ini terlihat terutama dari struktur kurikulum yang didominasi oleh pengajaran *al-'ulum al-shar'iyah* sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Adapun dalam kaderisasi nonformal seluruh aktivitas pendidikan pada dasarnya tidak secara khusus dan langsung diorientasikan untuk menyetak ulama Muhammadiyah, tetapi selain itu juga untuk menyiapkan pemimpin atau menjadi aktivis Muhammadiyah dalam bidang lainnya. Meskipun demikian, dalam kaderisasi nonformal, struktur kurikulum yang menjadi acuan kegiatan belajar dan mengajarnya utamanya terkait dengan pengajaran *al-'ulum al-shar'iyah* telah memenuhi syarat minimal menjadi seorang ulama sebagaimana yang akan dideskripsikan kemudian.

Untuk mengilustrasikan program kaderisasi ulama di Muhammadiyah, baik melalui jalur formal maupun non-formal, pada pembahasan berikut akan dideskripsikan bagaimana dinamika kaderisasi ulama Muhammadiyah. Agar pemahaman tentang hal tersebut lebih komprehensif, secara khusus, peneliti akan memaparkan kurikulum yang diberlakukan pada program kaderisasi tersebut. Pemaparan tentang kurikulum dianggap penting, karena meminjam pendapat Smith, dengan kurikulum pendidikan kita dapat memiliki gambaran bagaimana pengalaman belajar yang didapatkan oleh para calon ulama Muhammadiyah di institusinya masing-masing, baik secara individual maupun kelompok, di dalam maupun di luar kampus.

### **Kaderisasi Formal**

#### ***Pendidikan Khusus Ulama Muhammadiyah: PUTM***

Pendidikan yang secara khusus melakukan kaderisasi ulama di Muhammadiyah

bernama PUTM yang didirikan pada 1 Juli 1968. Berdirinya PUTM sebagai respons awal Muhammadiyah mengatasi defisit ulama setelah setengah abad ormas keagamaan ini berdiri. PUTM merupakan institusi formal setingkat perguruan tinggi yang memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang berkualitas dalam menyiapkan kader-kader ulama tarjih Muhammadiyah. Untuk merealisasikan visi tersebut, PUTM merumuskan 4 misinya, yaitu: [1]. Menyelenggarakan program pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dalam suasana kehidupan pribadi ulama; [2]. Menyelenggarakan penelitian di bidang keagamaan yang berorientasi pada integrasi seluruh bidang keilmuan yang terkait untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya; [3]. Menyelenggarakan berbagai kajian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka peningkatan dakwah Islam dan [4]. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan dalam kepemimpinan (Ismail, 2017).

Secara historis, PUTM didirikan pada tanggal 1 Juli 1968 di Yogyakarta. Untuk mendapatkan gelar sarjana formal, pendidikan ulama ini berkolaborasi dengan Fakultas Agama Islam jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jurusan Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan. Sebagaimana lazimnya sebuah pesantren, dalam aktivitas sehari-hari memisahkan kelas laki-laki dan perempuan dan menggunakan sistem pendidikan *fullday school*, yaitu pendidikan dari pagi hingga petang. Hingga kini, sebanyak 3 PUTM yang telah berdiri, yaitu PUTM Yogyakarta, PUTM Makassar, dan PUTM Malang.

Para mahasiswa di PUTM disebut dengan *thalabah* (mahasiswa/murid) baik bagi laki-laki maupun perempuan. Setiap calon *thalabah* harus mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Aisyiah (PWM/PWA) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Aisyiah (PDM/PDA) setempat. Karena para *thalabah* akan menjadi calon ulama yang harus menguasai *al-'ulum al-shar'iyah* yang menggunakan buku-buku berbahasa Arab (kitab kuning), maka mereka harus lulus tes admistrasi dalam bidang bahasa Arab dan imla-nya serta kompeten dalam

membaca kitab kuning. Selama menjadi *thalabah* di PUTM, mereka diwajibkan terjun ke tengah masyarakat misalnya menjadi khatib, guru ngaji, mubalig hijrah dan lainnya (Ismail, 2017). Selain itu, mereka juga diwajibkan mengikuti kegiatan perkaderan sebagaimana ditetapkan oleh Muhammadiyah.

Kaderisasi ulama melalui jalur formal di PUTM dapat dilihat terutama pengalaman

belajar dari peserta didik yang tergambar dalam struktur kurikulum yang didominasi oleh pembelajaran ilmu-ilmu yang terkait dengan *al-'ulum al-shar'iyah*. Pada tabel. 1 di bawah ini (Ismail, 2017), pembelajaran *al-'ulum al-shar'iyah* yang dijadikan profesi utama keulamaan di PUTM mengambil porsi sejumlah 82,7%, sedangkan profesi tambahan sebagai komplementer profesi utama sebanyak 17,3%.

**Tabel 1.** Struktur Kurikulum PUTM

Jenis Profesi	Komptensi Dasar	Mata Kuliah	SKS
Profesi Utama	Menguasai ilmu alat untuk memahami nash al-Qur'an, hadis dan sumber ilmu Islam lainnya	Ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Qiraatul Kutub (Strategi dan Metodologi), dan Bahasa Inggris (Reading Text)	4
		Muhadatsah, Insyah/Imla', Bahasa Indonesia (untuk terjemahan dan menulis makalah)	2
		Praktik Qiraatul Kutub dan Tarjamah	-
Profesi Utama	Memahami ilmu-ilmu dasar keIslaman (akidah, fikih dan akhlak dalam visi tajdid)	Aqidah/Tauhid, Akhlaq, Pengantar Ilmu Fikih, Kemuhammadiyah/ Keaisyiahaan, Kajian HPT I (Paham Agama dan Masalah Lima), dan Kajian HPT II (Ibadah Praktis)	2
Profesi Utama	Menguasai ilmu-ilmu tentang sumber hukum Islam (al-Qur'an dan hadis)	Ulumul Qur'an, Ulumul Hadis, Takhrijul Hadis (Praktik hingga hasil dan Ma'amil Hadis)	2
		Tafsir al-Qur'an, Tafsir Ahkam (Ibadah dan Muamalah), Hadis Ahkam	4
		Tahfidz al-Qur'an (10 Juz)	-
Profesi Utama	Menguasai berbagai hasil ijtihad ulama dan istidlalnya: klasik dan kontemporer	Fikih Ibadah, Zakat dan Wakaf, Fikih Munakahat, Fikih Mawaris, Fikih Iqtishadiyah, Ilmu Falak, Perbandingan Mazhab, dan Kapita Selekta Tarjih (Hasil Munas dan Fatwa)	4
Profesi Utama	Mengusai kaidah-kaidah dan metodologi istinbat dan ijtihad secara umum dan menguasai manhaj tarjih secara khusus	Fikih Jinayat dan Fikih Siyasah	2
		Pengantar Filsafat, Ilmu Mantiq, Tarikh Tasyri', Qawaid Fikih, dan Maqashid Syariyyah	2
		Usul Fiqih, Manhaj Tarjih, Metodologi Penelitian, Praktik Berijtihad dan Tugas Akhir	4
Total SKS kurikulum profesi			124
Persentase kurikulum profesi utama (ulama)			82,7%
Profesi Tambahan	Memahami ilmu tentang masyarakat, budaya, dan Pengembangannya	Sejarah Budaya dan Masyarakat Islam Indonesia, Perkembangan Aliran-aliran Islam di Indonesia (Pemikiran, Manhaj dan Gerakan), Ghazwul Fikr, Kristologi, dan Pengantar Hukum	2

Jenis Profesi	Komptensi Dasar	Mata Kuliah	SKS
Profesi Tambahan	Menguasai ilmu kepemimpinan	Leadership, Muhammadiyah, Muhammadiyah dan Kewirausahaan	2
Profesi Tambahan	Menguasai Fikih Dakwah	Manhaj Dakwah, Psikologi Dakwah, Komunikasi Dakwah dan Jurnalistik (Teknologi Informasi)	2
Total SKS kurikulum profesi tambahan			26
Persentase kurikulum profesi tambahan			17,3%

**Pendidikan Ulama dan Mubalig: Pondok Shabran**

Selain PUTM, kaderisasi ulama melalui jalur formal juga dilakukan oleh Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (selanjutnya disebut pondok Shabran), yang untuk pertama kalinya membuka program kaderisasi pada tahun akademik 1982/1983. Sebagai sekolah kader yang berada di bawah manajemen langsung PP Muhammadiyah, pondok Shabran sama dengan PUTM. Namun dalam konteks visi, keduanya berbeda. PUTM memiliki visi khusus untuk menyiapkan kader ulama tarjih, sedangkan pondok Shabran memiliki visi menjadi pusat pendidikan tinggi kader ulama tarjih dan tablig Muhammadiyah tingkat nasional untuk pencerahan umat dan bangsa menuju peradaban utama (Rosyidi, 2013).

Untuk merealisasikan visi tersebut, pondok Shabran merumuskan 3 misi, yaitu: [1]. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset yang diorientasikan pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kemuhammadiyah, terutama ketarjihan dan dakwah; [2]. Mengembangkan potensi mahasiswa menjadi kader ulama dalam bidang tarjih dan tablig yang berakidah kuat, taat beribadah, berakhlak mulia,

dan berkemajuan sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah; [3]. Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum Islam, dakwah, dan pengembangan Muhammadiyah (Rosyidi, 2013).

Dalam konteks kaderisasi ulama, pondok Shabran mengintegrasikan kurikulum pondok dengan Fakultas Agama Islam (FAI) dalam 3 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah/PAI), Ekonomi Islam (Syariah), dan Ilmu Alquran dan Tafsir. Pada tabel. 2 berikut ini (Rosyidi, 2013), ditampilkan kurikulum pondok Shabran sebagai gambaran pengalaman belajar mahasiswa yang kelak alumninya diharapkan menjadi calon ulama dan mubalig Muhammadiyah. Dari kuantitas materi dan jam belajar, kurikulum keulamaan memang terlihat masih mendominasi sekitar 60,6 % dibanding dengan kurikulum ke-tablig-an (dakwah) sebanyak 39,4%, tidak seperti halnya PUTM yang didominasi oleh kurikulum keulamaan mencapai 82,7%. Pemilahan kurikulum antara kurikulum keulamaan dan ke-tablig-an di sini tidak bersifat mutlak, karena beberapa mata kuliah yang ditempatkan pada kurikulum keulamaan juga dibutuhkan oleh seorang mubalig, seperti bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, dan lainnya.

**Tabel 2.** Struktur Kurikulum Pondok Shabran

No.	Mata Kuliah	SKS
1.	Bahasa Arab Asasi I	4
2.	Bahasa Arab Asasi II	4
3.	Bahasa Arab I	2
4.	Bahasa Arab II	2
5.	Bahasa Arab III	2
6.	Bahasa Arab IV	2
7.	Bahasa Arab V (Qiroatul Kutub)	2
8.	Bahasa Arab VI	2

No.	Mata Kuliah	SKS
9.	Bahasa Arab VII	2
10	Manhaj Tarjih Muhammadiyah	2
11	Praktik Ketarjihan	2
12	Fikih I (Fikih Ibadah I)	4
13	Fikih II (Fikih Ibadah II)	2
14	Fikih III (Fikih Munakahat)	2
15	Fikih IV (Fikih Mawaris)	2
16	Fikih V (Fikih Kontemporer)	2
17	Tafsir I (Tafsir Tarbawi)	2
18	Tafsir II (Tafsir Ahkam)	4
19	Tafsir III	4
20	Hadis I (Hadis Tarbawi)	4
21	Hadis II (Hadis Ahkam)	4
22	Hadis III	2
23	Ushul Fikih I	2
24	Ushul Fikih II	2
25	Ushul Fikih III	2
26	Qawaid Fiqhiyyah	2
27	Ulum Hadis I	2
28	Ulum Hadis II	2
29	Ulum Hadis III	2
30	Takhrijul Hadis	2
31	Ulumul Quran	2
32	Ilmu Tafsir	2
33	Qowaid Tafsir	2
34	Sejarah peradaban Islam Kalsik	2
35	Sejarah Peradaban Islam Modern	2
36	Ilmu Falak	4
<b>Total SKS</b>		<b>86</b>
<b>Persentase</b>		<b>60,6%</b>
<b>Mata Kuliah Dakwah/Tabligh</b>		
1.	Tahfiz I	2
2.	Tahfiz II	2
3.	Tahfiz III	2
4.	Tahfiz IV	2
5.	Tahfiz V	2
6.	Tahfiz VI	2
7.	Kemuhammadiyah I	2
8.	Kemuhammadiyah II	2
9.	Kemuhammadiyah III	2
10	Kemuhammadiyah IV	2
11	Islam di Indonesia	2
12	Akidah	2
13	Akhlaq	2
14	Ilmu Dakwah I (Fiqh Dakwah)	2
15	Ilmu Dakwah II (Strategi Dakwah)	2
16	Ilmu Dakwah III (Retorika Dakwah)	2
17	Ilmu Dakwah IV (Penyusunan Materi Dakwah)	2
18	Metodologi Studi Islam	2

No.	Mata Kuliah	SKS
19	Pemikiran Islam	4
20	Kristologi I	2
21	Kristologi II	2
22	Sistem Pengakderan Muhammadiyah	2
23	Bahasa Inggris I	2
24	Bahasa Inggris II	2
25	Tibbun Nabawi	2
26	Bimbingan Proposal Skripsi	2
27	Filsafat Ilmu	2
<b>Total SKS</b>		<b>56</b>
<b>Persentase</b>		<b>39.4%</b>

## Kaderisasi Nonformal

### *Revitalisasi Pendidikan Pesantren*

Secara historis, pesantren pertama Muhammadiyah yang berdiri dan masih tetap eksis hingga kini adalah madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Pesantren ini diinisiasi dan didirikan langsung oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, sekitar tahun 1911. Dorongan untuk mendirikan pesantren terutama dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk membuat model pendidikan baru yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan umum secara holistik dan integratif. Kiai Dahlan menolak adanya dualisme sistem pendidikan yang terjadi saat itu, dimana lembaga pendidikan agama hanya mengajarkan pelajaran agama seperti yang dipraktikkan di pesantren salafiyah di satu pihak, dan pendidikan sekuler model Belanda di pihak lain, yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum (Mu'arif, 2012).

Model integrasi pendidikan *ala* Muhammadiyah yang mengawinkan sistem pendidikan umum dan agama saat itu merupakan pemikiran baru dan dapat disebut sebagai modernisasi pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Dahlan tersebut memiliki visi melahirkan profil kader yang ia nyatakan kepada muridnya "*dadiyo ulama sing kemajuan lan ojo kesel-kesel ongonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah*", artinya "jadilah ulama yang berpikiran maju dan tidak merasa lelah dalam bekerja untuk bekerja untuk organisasi Muhammadiyah." Profil kader yang dimaksud tidak hanya menjadi kader ulama, tetapi juga menjadi kader Persyarikatan dan kader *zuama'* (pemimpin umat dan bangsa) (Tim

Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, 2017).

Dalam perkembangannya, pesantren di Muhammadiyah secara nasional tidak tumbuh secara signifikan. Muhammadiyah tampil menjadi ormas dengan ikon "sekolahan", bukan "pesantren". Pusat-pusat lembaga pendidikan Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dengan *mainstream* "perguruan", yang identik dengan "guru", bukan "ustadz" sebagaimana di pesantren. Hal ini terlihat dalam laporan PP Muhammadiyah saat muktamar di Makassar tahun 2015 bahwa ia telah memiliki 1772 sekolah tingkat SMP/MTs, sebanyak 1143 sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan 102 pesantren. Hal ini berarti jumlah pesantren yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk melakukan kaderisasi ulama hanya 4,1% jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang dikelolanya, itupun dengan asumsi sebuah pesantren mengelola satuan pendidikan setingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Minimnya jumlah pesantren sangat disadari secara langsung berimbas kepada kesiapan Muhammadiyah untuk menyediakan stok ulama pada tingkat sekolah menengah. Kesadaran ini melahirkan respons warga Muhammadiyah untuk mendirikan pesantren, sehingga pada setiap muktamar Muhammadiyah isu dan wacana tentang perlunya sekolah kader ulama selalu muncul. Meskipun secara organisatoris respons Muhammadiyah belum begitu terlihat, karena harus menunggu muktamar, tetapi para kader dan tokoh sesungguhnya telah menjawab masalah ini dengan mendirikan pondok pesantren, tahfiz Alquran dan *ma'had aly* di daerah masing-masing. Dengan menjamurnya

pondok pesanten dan *ma'had aly* ini mendorong terbentuknya *Ittihadul Ma'ahid al-Muhammadiyah* (ITMAM) atau Perhimpunan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Dalam acara Siltnas (Silaturahmi Nasional) bulan Mei 2015, sebelum muktamar Makassar pada bulan Juli pada tahun yang sama, diputuskan untuk merekomendasikan agar PP Muhammadiyah membentuk Majelis Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (Pendi-Pontren) (Syamsul, 2015).

Saat Muktamar ke-47 di Makassar pada tahun 2015, Muhammadiyah secara resmi, memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M). Untuk melakukan revitalisasi pesantren, Muhammadiyah mengeluarkan ketentuan dan peraturan dalam bentuk 3 Pedoman PP Muhammadiyah dan 22 Panduan LP2M. Namun semuanya masih untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Semua ketentuan dan peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren yang didirikan

oleh warga Muhammadiyah sejalan dengan visi pendidikan nasional kita, dan yang paling penting tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Agar pesantrenMu dapat berjalan efektif, efisien, dan kualitasnya sesuai harapan, Muhammadiyah menetapkan 9 standar pendidikan pesantren Muhammadiyah yang diadopsi dari lingkup 8 Standar Nasional Pendidikan kita (Peraturan Pemerintah RI, 2013), dengan tambahan standar Ismubaris (Al-Islam, Kemuhammadiyah, Bahasa Arab dan Inggris).

Pada tabel 3 di bawah ini (Tim Pengembang Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah, 2017), terlihat dengan jelas struktur kurikulum yang mengarah kepada pengembangan dan penguatan potensi ulama Muhammadiyah dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum al-shar'iyah*) terutama terlihat pada kurikulum Madrasah Aliyah yang telah terintegrasi dengan kurikulum pesantren pada 2 semester sebagaimana pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Struktur Kurikulum Pesantren Muhammadiyah

No.	Mata Pelajaran dan Kelas Semester	Kls 10		Kls 11		Kls 12	
		1	2	1	2	1	2
1.	<b>Al-Islam</b>						
	a. Al-Qur'an (Tafsir & Ulumul at-Tafsir)	4	4	4	4	4	4
	b. Ilmu Tauhid/Aqid	2	2	2	2	2	2
	c. Fikih dan Tarjih/HPT	2	2	2	2	2	2
	d. Ushul Fikih dan Manhaj Tarjih	3	3	3	3	3	3
	e. Hadis	4	4	4	4	4	2
	f. Ilmu Hadis	2	2	2	2	2	2
	g. Akhlaq	2	2	2	2	2	2
	h. Tarikh Hadharah Islamiyah	2	2	2	2	2	2
	i. Ilmu Falak/Astronomi	2	2	2	2	2	2
2.	<b>Bahasa Arab</b>						
	a. Qiraah	2	2	2	2	2	2
	b. Muhadasah	4	4	4	4	4	4
	c. Qawaid (Nahwu & Sharaf)	4	4	4	4	4	4
	d. Balaghah	-	-	4	4	4	4
	e. Manthiq	-	-	-	-	4	4
	f. Dirasah Nushuh Arabiyah (kutub at-Turats)	4	4	4	4	4	4
	g. Muhadharah wa Munazharah	2	2	2	2	2	2
	h. Insya'	2	2	2	2	2	2
3.	<b>Bahasa Inggris</b>						
	a. Listening	2	2	2	2	2	2
	b. Speaking	2	2	2	2	2	2
	c. Reading	2	2	2	2	2	2

No.	Mata Pelajaran dan Kelas	Kls 10		Kls 11		Kls 12	
	d. Writing	2	2	2	2	2	2
4.	Kemuhammadiyah/Keasiyahan	2	2	2	2	2	2
5.	Ilmu Keguruan	-	-	-	-	2	2
6.	Kewirausahaan	4	4	4	4	4	4
7.	Leadership	2	2	2	2	2	2
	Total Beban Belajar (@45 menit)	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>65</b>

Dengan memperhatikan struktur kurikulum pesantren Muhammadiyah di atas, maka kader ulama Muhammadiyah dapat dipersiapkan secara sistematis sejak dari pendidikan SMA/SMK/MA.

### Penyelenggaraan Pendidikan *Ma'had*

Secara etimologis, *ma'had* sesungguhnya berarti institusi, lembaga atau badan (Munawwir, 1984). Namun demikian *ma'had* juga secara etimologis diterjemahkan dengan pesantren (Arifin, 2012). *Ma'had* dengan pengertian pesantren juga digunakan oleh Muhammadiyah sebagaimana disebut dalam Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PAN/I.22/B/2018, pasal 2 dan Lampiran I, yang menyebutkan bahwa nama pesantren Muhammadiyah dapat menggunakan bahasa Arab, yaitu *ma'had* (Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, 2018).

Dalam perkembangannya, nama *ma'had* juga digunakan untuk menyebut penyelenggaraan pendidikan yang didirikan atas kerjasama Muhammadiyah dan AMCF memang berbentuk pesantren. Keunikannya *ma'had* ini hanya mengelola mahasantri atau mahasiswa setingkat perguruan tinggi. Mahasiswa yang menjadi mahasantri di *ma'had* adalah mereka yang telah lulus dari satuan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA. Dengan demikian, sebutan *ma'had* disini sama dengan sebutan *ma'had aly* atau pesantren tinggi yang digunakan biasanya di lembaga pendidikan pesantren, yaitu perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-din*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (Peraturan Menteri Agama (PMA), 2015). Selanjutnya dalam tulisan ini, untuk mengikuti nomenklatur yang telah baku, terminologi

*ma'had aly* dan *ma'had* digunakan dalam pengertian yang sama.

Penyelenggaraan pendidikan *ma'had* merupakan realisasi kerja sama antara Muhammadiyah dengan AMCF yang dituangkan secara khusus dalam naskah kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2001 M/03 Shafar 1422 H. MoU tersebut direvisi kembali pada 8 April 2011 M/4 Jumadil Ula 1432 H. MoU ini disebut *Agreement of Cooperation for The Development of Colleges for Arabic Language and Islamic Studies*.

*Asia Muslim Charity Foundation* (AMCF) atau dalam bahasa Arab مؤسسة مسلمي آسيا الخيرية atau dalam Bahasa Indonesia Yayasan Muslim Asia adalah sebuah yayasan filantropi internasional yang memberikan donasi dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, proyek dan keagamaan sosial keagamaan bagi masyarakat yang didirikan oleh seorang saudagar Muslim sukses asal Dubai, Uni Emirat Arab, bernama Mohammed M. Tayyeb Khoory. Secara yuridis, lembaga ini berdiri di Indonesia pada 11 Januari 1992 dengan nama *Dar al-Birr Society*. Pada 28 Juni 2002, yayasan ini bertransformasi secara intitusional sebagai badan hukum menjadi AMCF di depan notaris Yudo Purnomo, SH.

Selain telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Kementerian Soaial, AMCF juga telah terdaftar secara resmi di lembaga pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi hingga kementerian terkait. Dengan Organisasi Massa (ormas) di Indonesia, AMCF juga telah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah, Persatuan Islam (persis), Al-Irsyad dan lainnya (Tim Penyusun Profil AMCF, 2018). Menurut pendirinya, Khoory, AMCF menjalankan programnya hanya di Indonesia (Khoory, 2018).

Hingga tahun 2019, terdapat 20 ma'had yang telah dibangun di seluruh Indonesia sebagai realisasi MoU tersebut, yaitu: [1]. Ma'had Abdurrahman bin Auf, Malang; [2]. Ma'had Abu Bakar As Shiddiq, Solo; [3]. Ma'had Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Medan; [4]. Ma'had Al Birr, Makassar; [5]. Ma'had Al Imarat, Bandung; [6]. Ma'had Al Kazhim, Ternate; [7]. Ma'had Al Khansa, Pontianak; [8]. Ma'had Ali Bin Abi Thalib, Yogyakarta; [9]. Ma'had Az bin Al Awwam, Padang; [10]. Ma'had Bilal bin Rabah, Sorong; [11]. Ma'had Dzin Nurain, Jakarta; [12]. Ma'had Hasan bin Ali, Samarinda; [13]. Ma'had Hasan Bin Ali, Samarinda; [14]. Ma'had Khalid bin Al Walid, Mataram; [15]. Ma'had Saad bin Abi Waqqas, Palembang; [16]. Ma'had Said bin Zaid, Batam; [17]. Ma'had Talhah bin Ubaidillah, Palu; [18]. Ma'had Umar bin Khattab, Surabaya; [19]. Ma'had Utsman bin Affan, Jakarta; dan [20]. Ma'had Asy Syafii, Palangkaraya.

Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) pasal 1 disebutkan bahwa kerjasama antara Muhammadiyah dan AMCF dalam menyelenggarakan pendidikan *ma'had* adalah untuk memajukan pengajaran bahasa Arab dan Studi Islam di Indonesia, dimana silabusnya sesuai dengan Alquran dan Sunah yang diajarkan di Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap berkomitmen menjalankan silabus ini walaupun MoU berakhir atau terjadi suksesi kepemimpinan dalam internal Muhammadiyah.

Meskipun tujuan kerjasama penyelenggaraan pendidikan *ma'had*, sebagaimana tertuang dalam MOU tersebut, tidak disebutkan secara spesifik untuk melahirkan ulama, baik AMCF maupun Muhammadiyah secara tegas mengatakan bahwa kerjasama ini hakikatnya bertujuan untuk mengatasi defisit ulama Muhammadiyah, sebagaimana dikatakan oleh bos AMCF, Syekh M.T. Khoory (2018). Ia mengatakan:

“طبعاً، هذا (المعهد يكون كيدور كوادير العلماء) هو الأساس الذي هو من أجل أملنا المعهد. والبداية صراحة أستاذ دين شمس الدين الذي هو شجعني على هذا. وعندما تكلمنا معه، وجزاه الله الخير، وأملت على الإتقيات مع الإدارة المركزية الجمعية المحمدية

بجاكرتا، ثم قال لي اذهب واتفق مع الجامعات، وليكون الأمور إن شاء الله سهلة، ونحن نحاول على المساعدة”.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, tujuan penyelenggaraan pendidikan *ma'had* sebagaimana yang disampaikan oleh Khoory, yaitu sebagai tempat kaderisasi ulama Muhammadiyah disetujui oleh semua informan dari kedua pihak, baik dari unsur PP Muhammadiyah atau perwakilan AMCF di Indonesia, seperti Haedar Nashir (2018), Yunahar Ilyas (2018), Syafiq Mugni (2019), Agung Danarto (2018), Syamsul Anwar (2019), Marpuji Ali (2019) dan dari AMCF, Achmad Yamani (2018). Tidak ada satupun perbedaan pendapat dari mereka tentang hal itu.

Tampak sekali bahwa tujuan kerjasama penyelenggaraan pendidikan *ma'had* yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, seperti tertuang dalam MoU, sejak awal adalah merupakan tujuan antara, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menyiapkan kader ulama yang kompeten dan dapat diandalkan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi.

Di seluruh *ma'had* PTM terdapat 3 program studi, yaitu: *pertama*, program *al-Tamhidi* (Pra Persiapan Bahasa) atau biasa disebut Program *Tamhidi*. Level ini sebagai kelas persiapan bagi mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan pada program *al-I'dad al-Lugawi* merupakan jenjang awal perkuliahan yang sebenarnya di *ma'had*. Di program ini mahasiswa hanya belajar satu semester atau 6 bulan.

Kedua, program *al-I'dad al-Lugawi* (Persiapan Bahasa). Program ini biasa disebut dengan singkatan *Program I'dad*. Program *al-I'dad al-Lugawi* dianggap sebagai level awal pembelajaran di *ma'had*. Pada level ini mahasiswa belajar selama dua tahun atau empat semester (setara D2). Ketiga, program *Shu'bah al-Ta'lim at-Takmili* (Program komplementer). Program ini biasa disebut dengan singkatan Program *Takmili*, yaitu jenjang penyempurna program *al-I'dad al-Lugawi* dan merupakan jenjang terakhir yang ditempuh oleh mahasiswa di *ma'had*. Pada program ini mahasiswa belajar selama satu tahun (dua semester) penuh (setara D3).

Dalam praktiknya, program ini diintegrasikan dengan jurusan yang tersedia di Fakultas Agama Islam (FAI) PTM setempat. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa jika selama ini program *ma'had* hanya sampai program diploma tiga (D3) dan secara yuridis tidak diakui oleh Negara, maka *ma'had* menyiapkan 2 pola untuk mendapatkan pendidikan formal dan diakui oleh Negara, yaitu [1]. Program Sarjana Reguler, dan [2]. Program Sarjana Transfer (Lanjutan). Program Sarjana Reguler maksudnya adalah program pendidikan yang disiapkan bagi mahasiswa *ma'had* yang ingin mendapatkan pendidikan formal setingkat sarjana dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa *ma'had* sekaligus menjadi mahasiswa FAI pada jurusan yang dipilih sejak semester pertama. Sedangkan Program Transfer (Lanjutan), yaitu program pendidikan yang disiapkan bagi mahasiswa *ma'had* yang ingin melanjutkan dan mendapatkan gelar sarjana formal yang diakui oleh Pemerintah setelah menyelesaikan

program diploma tiga (D3). Biasanya mereka mulai masuk dari semester 6.

Agar mutu dan kualitas pendidikan terjamin, semua dosen *ma'had* harus memiliki kompetensi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, dan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal B atau dengan predikat *jayyid* (baik). Untuk mendapatkan dosen yang memiliki kualifikasi dalam bidang bahasa Arab, biasanya mereka adalah para alumni perguruan tinggi dari Timur Tengah. Hal ini bertujuan agar dalam aktivitas belajar mengajar lebih kondusif dan efektif, terutama untuk menjamin akselerasi penguasaan ilmu Islam dengan bekal kompetensi bahasa Arab yang mereka miliki.

Dari aspek materi, kurikulum intrakurikuler didominasi oleh mata kuliah yang berhubungan langsung dengan bahasa Arab (Tim Penyusun Profil AMCF (2018), yaitu sekitar 77,85%. Sedangkan materi studi Islam sebanyak 22,15% sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.

**Tabel 4.** Kurikulum Ma'had

No	Mata Kuliah	Program/Semester/Jam	I'dad Lughawy				Takmily	
			Tamhidy	Sm 1	Sm 2	Sm 3	Sm 4	Sm 1
<b>I</b>	Bahasa Arab							
	1. <i>Tadribat Lughawiyah</i>	8	6	6	-	-	-	-
	2. <i>Ta'bir Tahriry</i>	3	2	2	3	2	3	2
	3. <i>Ta'bir Syafawy</i>	2	4	4	3	3	3	3
	4. <i>Qira'ah/Fahmul Maqru'</i>	4	6	6	3	2	3	2
	5. <i>Imla' dan Khat</i>	2	2	-	-	-	-	-
	6. <i>Ashwat</i>	2	3	-	-	-	-	-
	7. <i>Qawaid {Nahwu dan Sharaf}</i>	-	-	-	4	3	4	3
	8. <i>Adab</i>	-	-	-	2	3	2	3
	9. <i>Balaghah</i>	-	-	-	-	2	-	3
	10. <i>Maharat Lughawiyyah</i>	-	-	-	-	-	-	-
	11. <i>Ta'bir Li Takmily</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21	23	18	15	15	15	16
	Total		<b>123 Jam (77, 85 %)</b>					
<b>II</b>	Studi Islam							
	1. <i>Al-Qur'an dan Tajwid</i>	2	-	-	-	-	2	-
	2. <i>Al-Qur'an dan Tafsir</i>	-	2	3	3	2	-	2
	3. <i>Hadits</i>	2	-	2	2	2	2	-
	4. <i>Tauhid</i>	-	-	-	1	1	-	-
	5. <i>Fiiqh</i>	-	-	-	1	1	-	-
	6. <i>Ushul Fiqh</i>	-	-	-	-	1	-	-
	7. <i>Tarikh Islam</i>	-	-	-	1	1	-	-
	8. <i>Peradaban Islam</i>	-	-	-	1	1	-	-
	Jumlah	4	2	5	9	9	4	2
	<b>Total</b>		<b>35 (22, 15%)</b>					

Dominasi materi bahasa Arab dalam program intrakurikuler di *ma'had* bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki 4 kompetensi dasar berbahasa, yaitu kompetensi mendengar (*maharatul istma'*), kompetensi berbicara (*maharatul kalam*), kompetensi membaca (*maharatul qira'ah*), dan kompetensi menulis (*maharatul kitabah*) (Bakri, 2019 dan Muchtar, 2015).

Namun demikian, muatan kurikulum yang didominasi oleh bahasa Arab memiliki keunikan tersendiri sebagaimana terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Bakri. Menurutnya, buku-buku teks yang dijadikan sebagai *muqorror* dalam mata kuliah bahasa Arab di *ma'had* dalam proses penyusunannya menggunakan pendekatan integralistik. Secara teknis, buku tersebut memang digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Namun demikian, secara substansial, materi buku tersebut berisi tentang prinsip-prinsip ajaran agama (Bakri, 2019), seperti akidah, akhlak, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain.

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pendamping sekaligus pendukung kegiatan intrakurikuler untuk mendalami, mengeksplorasi dan menghayati materi-materi dalam kegiatan intrakurikuler di luar jadwal kegiatan kelas. Kitab-kitab kuning yang dikaji dalam kegiatan kokurikuler adalah kitab *Fiqih al-Sunnah*, kitab *Qawā'id al-Lughah*, kitab *Subul al-salām*, kitab *al-Arba'in al-Nawāwiyah*, dan kitab *Sirah Nabawiyah* (Muckhtar, 2018) yang menggunakan kitab *al-Rahīq al-Makhtūm* karya Syifa'ur Rahman al-Mubarakfuri.

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dimana mahasiswa diterjunkan langsung ke tengah masyarakat. Mereka akan diutus ke Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting Muhammadiyah, atau desa-desa terpencil di seluruh pelosok nusantara.

Pandemi global covid-19 yang terjadi sejak Desember 2019 atau awal tahun 2020 ternyata membawa dampak signifikan terhadap postur anggaran AMCF. Pada bulan September 2020, AMCF mengajukan adendum kerjasama dengan Muhammadiyah dengan menyampaikan proposal bahwa program *ma'had* tidak dapat lagi dibiayai seluruhnya oleh AMCF. Karena

itu, seluruh aset dan program *ma'had* diserahkan kepada Muhammadiyah. Dari 21 *ma'had* yang ada, mayoritas diantaranya bertransformasi menjadi PUTM. Sedangkan beberapa *ma'had* yang lain melanjutkan program pendidikan yang telah berjalan seperti semula dengan dukungan sumber daya dari AMCF.

## PENUTUP

Muhammadiyah belum memiliki konsep tentang ulama secara jelas dan detail. Para tokoh memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan konsepsi dan kualifikasi ulama dalam Muhammadiyah. Namun demikian, terdapat minimal 2 karakteristik ulama yang menjadi idealisme Muhammadiyah, yaitu (1) Menguasai ilmu-illmu keagamaan (*al-'ulum al-shari'yyah*); dan (2) Terlibat dan berbaur dalam kegiatan masyarakat (*al-ihitimam bi umur al-ummah*). Dalam mengatasi defisit ulama, Muhammadiyah telah melakukan langkah-langkah yang cukup dinamis meliputi 3 jalur, yaitu: mendirikan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), revitalisasi peran pesantren, dan membangun kerjasama dengan AMCF.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya model baru kaderisasi ulama dengan membangun jaringan kerjasama institusional antara Muhammadiyah dengan sebuah lembaga filantropi internasional bernama *Asia Muslim Charity Foundation* (AMCF). Temuan penelitian merupakan pengembangan dari "teori jaringan ulama" yang dicetuskan oleh Azyumardi Azra bahwa jaringan ulama nusantara dengan ulama Timur Tengah yang bersifat individual dan familier (non-institusional) pada abad ke-17 juga berhasil dimanfaatkan sebagai media kaderisasi ulama di tanah air. Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya kajian mendalam tentang efektivitas pendidikan *ma'had* sebagai media kaderisasi ulama Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal (2012) 'Perkembangan Pesantren di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9 (1).
- Anonym (2016) *Kebutuhan Muhammadiyah Terhadap Ulama*, Tersedia

- pada://www.tabligmu.or.id (Diakses: 31 January 2022).
- Ali, Marpuji (2019) *Wawancara*, di Hotel Santika Lombok, tanggal 17 Agustus.
- Anwar, Syamsul (2017) 'Pengantar' untuk *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Oleh Ghoffar Ismail dkk. Yogyakarta: Gramasurya.
- \_\_\_\_\_ (2019) *Wawancara*, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tanggal 16 Februari.
- Bakri dkk., Muhammad Ali (2019) 'Institutional Transformation of the Al-Birr Collegge as a form of Regeneration Scholars in University of Muhammadiyah', *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6, (7).
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan, Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Danarto, Agung (2018). *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli.
- Djamil, Fathurrahman (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House.
- Dhofier, Zamakhsyari (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fatah, Nanang (2000). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosd Karya.
- Hirokoshi, Hiroko (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M.
- Hidayat, Syamsul (2015). 'Penguatan Kaderisasi Ulama', dalam Abdul Mu'ti dkk., *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ilyas, Yunahar (2018). *Wawancara*, di Universitas Ahmad Dahlan, tanggal 29 Juli.
- Ismail dkk., Ghoffar (2017), *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Ismail, Ghoffar (2017). *Standar Pengelolaan Asrama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiah*. Yogyakarta: Gramasurya.
- (2020), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2020 Melalui Jaringan Telepon.
- Isnanto, Muh. (2017) 'Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama: Studi Kasus Tentang Ulama di Muhammadiyah', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17 (2).
- Jainuri, Achmad (2002). *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Awal*. Surabaya: LPAM.
- Kartono, Kartini (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab (1978). *Ilm Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Ilm.
- Khoory, Mohammed Tayyeb (2018), 'Kebahagiaan Tertinggi Saya adalah Bisa Membantu', *Suara Muhammadiyah*, 09 (103).
- , Mohamed Tayyeb (2018). *Wawancara*, Tanggal 18.
- Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah (2018), *Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Serta Panduan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Makmur, Ahdi (2012), 'Peran Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan', *MIQOT*, 36 (1).
- Moleong Lexy J. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah, PP, (2015), *Laporan PP Muhammadiyah saat Muktamar*

- Muhammadiyah ke-47 di Makassar, 16-22 Syawal 1436 H./3-7 Agustus 2015.*
- , (2011), *Agreement of Cooperation for The Development of Colleges for Arabic Language and Islamic Studies* tanggal 8 April 2011M/ 4 Jumadil Ula 1432 H.
- Mughni, Syafiq (2019). *Wawancara*, di Hotel Grage, Bengkulu, Tanggal 17 Februari.
- Miles, Mattew, dan A. Michel Haberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press,
- Mu'arif (2012) *Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadijah 1923-1932*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muchtar, M. Ilham (2015). 'Penerapan Metode Al-'Arabiyyah Bayna Yadaik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Ma'had al-Birr Makassar', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12 (1).
- \_\_\_\_\_ (2018). 'Peningkatan Penguasaan *Mufradat* Melalui Pengajian Kitab pada Mahasiswa Ma'had al-Birr Unismuh Makassar'. *Al-Maraji': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2 (2).
- Muzizatullah dkk. (2018), 'Sejarah Dan Program Pendidikan Ma'had Al-Birr Pada Universitas Muhammadiyah Makassar', *Journal UIN Alaudin*, 7 ( 2).
- \_\_\_\_\_ (2018). 'Sistem Pengajian Kitab Kuning pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi', *Al-Ulum*, 18 (2)
- Miles dan Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. United State of America: SAGE Publication.
- Nashir, Haedar (2018). *Wawancara*, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, tanggal 4 Juli.
- Rosyadi, Imron (2013). *Buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Smith, Mark K (2002). *Curriculum Theory and Practice*. London: Routledge.
- Sugiono (2014).. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Pengembang (2017), *Standar Pendidikan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2017 Kelas IV-VI (X-XII SMA/MA) Pesantren Muhammadiyah Se-Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Tim Penyusun, (1994), *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: INIS.
- Tim Penyusun (2018). *Profile AMCF (Asia Muslim Charity Foundation)*. Jakarta, Tp: 2018.
- Yaman, Ahmad (2018). *Wawancara*, di kantor AMCF, Jln Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 4 Juli.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) (2015), Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader (2016). *Sistem Perkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2013). Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rosidin, Didin Nurul, (2012) 'Pesantren and Modernity In Indonesia: Ma'had Aly Of Kuningan', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 9 (2).